

**LAPORAN DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KE SIDANG *ANNUAL DEMOCRACY FORUM 2016*
TANGGAL 25-26 AGUSTUS 2016, ULAANBAATAR - MONGOLIA**

Sesi Pembukaan

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (**IDEA**) yang didirikan pada tahun 1995 merupakan organisasi antarpemerintah yang beranggotakan negara-negara dari semua benua, yang berfokus untuk menyebarkan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia. IDEA berkerjasama sama dengan organisasi-organisasi dunia lainnya baik yang bentukan pemerintah maupun LSM politik.

IDEA mengadakan forum tahunan yang dinamakan sebagai Annual Democracy Forum (ADF). Untuk tahun ini, IDEA bekerjasama dengan Pemerintah Mongolia menghelat Annual Democracy Forum 2016 di Ulaanbaatar 25-26 Agustus 2016. Acara kali ini bertajuk *Learning from Democratic Transition*. Forum ini bertujuan untuk membawa pelaku-pelaku yang terlibat dalam transisi demokrasi di Asia Pasifik dari generasi yang lebih tua dan lebih muda dalam dialog dari pengalaman yang telah mereka jalani.

Yves Letterme Sekjen *International Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) yang juga mantan perdana menteri Belgia membuka dengan memberikan sambutan bahwa transisi demokrasi yang jadi agenda dalam Annual Democracy Forum (ADF) ini di antaranya adalah yang terjadi di Indonesia, Filipina dan Mongolia.

Ujar Yves Letterme dalam pidato pembukaan *Annual Democracy Forum* menyebut Mongolia bertransformasi ke arah demokrasi pada tahun 1990 yang dilakukan oleh pergerakan-pergerakan anak mudanya.

Menurut Yves, beberapa negara Asia ini selalu berkonsolidasi termasuk dalam reformasi konstitusinya, dalam pemilu, dan pertumbuhan ekonominya. Abad ke-21 ini membawa mereka untuk lebih memperhitungkan hal-hal yang tepat secara langsung,

partisipasi dan lebih erat lagi dalam bidang ekonomi, terutama dilakukan oleh generasi mudanya di mana pemerintah membutuhkan respons yang cepat.

Menurut dia, transisi demokrasi lainnya adalah yang terjadi di Bhutan, Nepal, Kyrgyzstan, dan yang sedang terjadi sekarang yaitu Myanmar. Ia mengkhawatirkan banyak negara gagal dalam mengelola demokrasi setelah terjadi transisi, sehingga hal inilah penting dibahas dalam dialog ADF.

Letterme berharap, dalam ADF ini Mongolia, Indonesia, Bhutan, Nepal, dan Filipina maupun negara-negara lainnya bisa berbagi pengalaman dan ide-idenya untuk transisi demokrasi bagi negara- negara yang saat ini sedang berproses ke arah demokrasi yang lebih baik.

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam *Annual Democracy Forum 2016*, tanggal 25-26 Agustus 2016, Ulaanbaatar - Mongolia, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 214/PIMP/V/2015-2016 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghadiri Annual Democracy Forum 2016 di Ulaanbaatar, Mongolia. Adapun Susunan Delegasi terdiri dari Dr. Fadli Zon sebagai Ketua Delegasi dan Hamdani, S.IP sebagai Anggota Delegasi.

Sesi I: Constitutional Transition

Moderator: Ms. Leena Rikkila Tamang, Direktur Program Asia Pasifik International IDEA

Panellists:

- 1) Mr. Ochirbat P, mantan Presiden Mongolia
- 2) Mr. Chen Bunn Young, Ketua Komisi Pemilihan Umum Fiji
- 3) Hon. Ms. Mohna Ansari, Komisioner Komnas HAM Nepal
- 4) Hon. Dasho Kunzang Wangdi, Ketua Pertama Komisi Pemilihan Umum Bhutan dan Badan Penelitian dan Penasihat Kerajaan Bhutan
- 5) Mr. Sergio Victor, Ketua Penasihat Mahkamah Pemilihan Umum Brazil

Ms. Leena Rikkila Tamang, sebagai moderator, membuka sesi pertama dengan mengantar peserta kepada dua fenomena dalam kebanyakan kasus transisi konstitusi dari satu rezim ke rezim yang lain: (1) adanya reformasi konstitusi negara baik itu proses amendemen konstitusi (seperti kasus Indonesia) atau menyusun konstitusi yang sama sekali baru (seperti kasus Nepal); dan (2) pemilihan umum. Beberapa debat yang mengiringi kedua fenomena tersebut menyangkut beberapa isu-isu fundamental: hak-hak ekonomi, sosial-politik, detail sistem pemilu, peran militer dalam negara, serta otonomi daerah dan keterwakilan yang inklusif.

Ms. Mohna Ansari, Komisioner Komnas HAM Nepal berbagi pengalaman Nepal dalam transisi konstitusional. Secara historis, Nepal adalah monarki berbasis ajaran Hindu. Nepal adalah negara kesatuan dengan kekuatan dan sumber daya dimonopoli oleh elit politik kasta atas. Nepal masih diselimuti kesenjangan sosial dan ekonomi, kasta, suku serta diskriminasi berbasis gender, kemiskinan, pengangguran dan korupsi. Banyak dari hal-hal tersebut masih dapat dijumpai di Nepal.

Dalam perjalanan waktu, Maois melancarkan perjuangan bersenjata melawan monarki dan parlemen demokrasi di tahun 1995. Pemberontakan bersenjata belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan ini menimbulkan penderitaan rakyat Nepal akan tetapi sekaligus juga menarik dukungan dari sebagian besar populasi.

Pada tahun 2005, raja memecat pemerintah terpilih dan mengambil kekuasaan eksekutif. Setelah kesepakatan 12 poin antara kaum Maois dan partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen, pemberontakan rakyat pada 2006 berhasil menggulingkan raja. Sebuah Perjanjian Perdamaian ditandatangani antara pejuang Maois dan tentara Nepal di bawah pengawasan PBB. Dari hasil perjanjian tersebut, konstitusi sementara Nepal dirancang dan pemerintahan sementara Nepal dibentuk. Namun konflik etnis dan komunal yang melanda Nepal menghambat jalannya pemilihan Majelis Konstituante (Constitutional Assembly/ CA). Akhirnya, pada tahun 2008 sebanyak 601 orang terpilih sebagai anggota CA yang bertugas mengelola proses penyusunan konstitusi dalam kurun dua tahun. Sidang pertama CA menyatakan Nepal sebagai negara republik, sebagai konsekuensi keputusan tersebut CA menghapuskan monarki yang berusia 240 tahun. Menurut Mona, konstitusi adalah untuk melembagakan keputusan politik untuk mengubah bentuk negara dari monarki ke republik, negara hindu ke sekuler dan kesatuan ke federal.

Mona melanjutkan paparan bahwa CA gagal mencapai konsensus tentang ketentuan pemberlakuan konstitusi baru dan dibubarkan setelah empat tahun bekerja. Dalam keanggotaan CA yang baru terpilih pada 2013, partai-partai politik utama tua muncul menginginkan transformasi sosial politik. Keseimbangan kekuatan berubah. CA mengeluarkan konstitusi baru pada tahun 2015. Namun kelompok yang tidak puas menentang kuat. Protes berlangsung selama beberapa bulan dan nyaris melumpuhkan Nepal. Lebih dari 50 orang tewas. Dalam titik inilah, Mona melihat bahwa pelaksanaan konstitusi baru menghadapi tantangan serius.

Dalam penutupnya, Mona mengatakan bahwa konstitusi Nepal diundangkan kurang dari satu tahun yang lalu. Salah satu amandemen dibuat pada tanggal 23 Januari 2016. Amandemen yang lain diharapkan akan diajukan segera. Kesenjangan sedang diidentifikasi dan amandemen selanjutnya diharapkan akan diajukan mengingat bahwa Nepal baru mengalami transisi dan mengantisipasi ketentuan konstitusional selama 3-5 tahun ke depan.

Pembicara selanjutnya Dasho Kunzang Wangdi berbagi pengalamannya sebagai Ketua Pertama Komisi Pemilihan Umum Bhutan tentang transisi demokrasi di Bhutan. Pemilihan parlemen demokratis pertama Bhutan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2008. Untuk pertama kalinya para pemilih Bhutan ke pemungutan suara di negara itu untuk memilih 47 anggota Majelis Nasional (majelis rendah). Majelis Nasional membentuk kamar untuk partai yang mendapatkan kursi parlemen sebagai hasil demokrasi baru di Bhutan. Pemilihan 20 anggota individu untuk Dewan Nasional sudah dilakukan pada 31 Desember 2007 dan 29 Januari 2008, di mana Raja menominasikan lima anggota.

Yang Mulia Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Raja ke-5 Bhutan, sejak Desember 2006, menjadi Kepala Negara setelah ayahnya, Raja Jigme Singye Wangchuck, yang memerintah dari tahun 1972, mengundurkan diri pada 2006. Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dididik di Amerika Serikat dan Inggris, dan seperti ayahnya ia memiliki pandangan modern dan reformis yang diperlukan untuk pembangunan negara.

Proses demokratisasi Bhutan telah terus berkembang. Konstitusi demokratis baru, setelah perdebatan yang serius dan menyeluruh, ditetapkan oleh parlemen yang baru terpilih, dan ditandatangani oleh Raja pada tanggal 18 Juli 2008. Konstitusi tidak hanya memastikan bahwa Bhutan dianggap sebagai negara demokrasi, tetapi juga mempertimbangkan budaya dan latar belakang sejarah Bhutan yang unik. Draft akhir untuk konstitusi demokratis pertama negara itu dari Agustus 2007 membentuk dasar untuk pemilihan yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008. Konstitusi baru jelas menggambarkan hak-hak sipil yang fundamental bagi semua warga negara Bhutan. Antara lain hak-hak ini menyiratkan keadilan yang sama di bawah hukum dan pendidikan gratis bagi semua anak. Akses ke pendidikan lebih lanjut berdasarkan kualifikasi juga jelas ditentukan, batas usia 65 tahun untuk pensiun raja, larangan terhadap hukuman mati, dan perlindungan lingkungan hidup.

Bhutan memperkenalkan konsep Gross National Happiness (GNH). Konsep struktur GNH menggabungkan substansi tujuan kebijakan. GNH pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 oleh Raja Jigme Singye Wangchuk, pada dasarnya menggabungkan kebijakan modernisasi dan Konservatif. Esensinya adalah bahwa pembangunan ekonomi khususnya dan modernisasi pada umumnya, harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dari segi spiritual dan sosial. Ini, dengan demikian, menyerupai komitmen konstan monarki menjadi responsif terhadap kesejahteraan rakyat, sekaligus membimbing Bhutan sepanjang jalan pembangunan untuk beradaptasi dengan tantangan dunia yang terus berubah. GNH mengidentifikasi empat aspek utama dari kebijakan: pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, promosi budaya, dan pemerintahan yang baik.

Dasho Kunzang Wangdi menjelaskan bahwa GNH selanjutnya, menyerupai adaptasi modern tradisi Buddhis, seperti yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip tradisional konsiliasi, pragmatisme, dan kasih sayang. GNH adalah landasan tambahan dalam upaya untuk menciptakan sebuah identitas nasional yang koheren. Sering disebut sebagai *'Bhutanization policy'*, itu adalah usaha dari kerajaan untuk membentuk identitas umum dan berlaku umum di antara orang-orang Bhutan. Upaya ini dimulai di bawah Raja ketiga Bhutan pada 1960-an ketika ia memperkenalkan Dzongkha sebagai bahasa nasional. Kemudian *'dress code'* diberlakukan sebagai keharusan warga negara untuk mengenakan pakaian tradisional Bhutan ketika memasuki ruang publik.

Mr. Sergio Victor, Ketua Penasihat Mahkamah Pemilihan Umum Brazil membuka paparannya dengan informasi bahwa konstitusi Brasil saat ini adalah konstitusi ketujuh yang berlaku sejak kemerdekaan Brazil pada tahun 1822, dan keenam sejak proklamasi republik pada tahun 1889. Hal itu diumumkan pada tanggal 5 Oktober 1988 setelah proses penulisa yang memakan waktu dua tahun.

Transisi demokrasi di Brazil tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar di Brasil pada tahun 1988 saat diberlakukannya Konstitusi baru yang memungkinkan pemilihan presiden secara langsung. Krisis ekonomi telah membuat militer kehilangan prestisenya di mata rakyat Brazil, sehingga legitimasi mereka terancam. Pemerintahan Militer Brazil pada 1982 telah kehilangan justifikasi atas peran sosial politik di Brazil. Pemerintahan Militer kemudian menyadari bahwa menjalankan pemerintah tidak semudah yang bisa mereka bayangkan. Keberhasilan ekonomi mutlak menjadi indikator kesuksesan pemerintahan mereka. Dalam kondisi seperti inilah kemudian liberalisasi politik dijadikan semacam 'pengalihan isu' oleh pihak Militer.

Perubahan sikap militer yang mulai menyadari bahwa posisi mereka semakin lemah membawa perubahan tersendiri bagi perkembangan demokratisasi di Brazil yang beriringan dengan demiliterisasi. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menyebabkan negosiasi antara pihak militer dan oposisi sipil dapat berjalan lancar. Demokrasi telah menjadi pilihan bagi Brazil. Mereka memilih lepas dari jeratan otoritarianisme dan bergerak melakukan transisi menuju demokrasi. Dalam amatan Sergio Victor pilihan Brazil waktu itu tidak mudah sebetulnya karena transisi menuju demokrasi biasanya terwujud dalam kudeta atau revolusi berdarah.

Pada bulan Oktober 1988 Fernando Collor de Mello, calon presiden dari Partai Konvensional berhasil memenangi Pemilu dan dilantik menjadi Presiden Brasil pada bulan Desember 1989. Presiden Collor berupaya menurunkan angka inflasi dengan melakukan berbagai terobosan di bidang ekonomi. Upaya tersebut berhasil menurunkan tingkat inflasi dan perekonomian Brasil mulai tumbuh.

Sergio Victor mengutarakan bahwa konstitusi Brasil saat ini dirancang sebagai reaksi terhadap kediktatoran militer, dan berusaha untuk menjamin hak-hak individu dan membatasi kemampuan negara untuk membatasi kebebasan, menghukum pelanggaran dan untuk mengatur kehidupan individu. Masih menurutnya, konstitusi Brazil adalah konstitusi pertama yang menuntut hukuman berat bagi pelanggaran kebebasan sipil dan hak asasi. Akibatnya, Brasil kemudian menyetujui undang-undang

membuat penyebaran prasangka terhadap minoritas atau kejahatan terhadap kelompok etnis tertentu. Hukum ini mengupayakan hukuman terhadap mereka yang menyebarkan kebencian atau mereka yang tidak memperlakukan semua warga negara sama. Aspek kedua ini membantu orang-orang cacat memiliki persentase pekerjaan dalam pelayanan publik serta tuntutan bagi pelaku rasisme di pengadilan.

Di akhir paparannya, Sergio Victor menarik kesimpulan bahwa periode 1985-1989 transisi menuju demokrasi dikonsolidasikan di Brazil. Sebuah konstitusi baru disahkan pada tahun 1988, dan dijuluki "Konstitusi Citizen" karena konstitusi tersebut mengembalikan hak-hak warga yang telah diambil oleh rezim totaliter.

Mr. Chen Bunn Young, Ketua Komisi Pemilihan Umum Fiji menceritakan sejarah transisi demokrasi di Fiji. Chen mengakui Fiji, sebagai negara bekas koloni Inggris, adalah anomali dalam sistem politik pemerintahan. Hal tersebut, menurut Chen, disebabkan sering terjadinya kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah.

Chen melanjutkan paparannya dengan analisis bahwa hubungan sipil-militer di Fiji sering memasuki era yang tidak menguntungkan bagi terjadinya transformasi demokrasi sekaligus transformasi pemerintahan sipil. Hubungan sipil-militer di negara Pasifik itu sering berakhir dengan krisis politik yang berujung kudeta terhadap pemerintahan sipil. Seperti diketahui sejak tahun 1987 hubungan sipil-militer di Fiji berada di ujung antagonisme. Hal ini tentu merupakan preseden buruk bagi transformasi demokrasi sekaligus transformasi kepemimpinan sipil Fiji secara damai, melalui mekanisme legal formal dan bukan dengan mekanisme kudeta.

Sebagai metode perebutan kekuasaan, *coup d'état* militer yang mengandalkan kekuatan fisik dianggap sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang menekankan demokratisasi. Kini, keadaan Fiji sudah banyak berubah yang mendorong proses demokratisasi. Kudeta militer dinilai oleh rakyat Fiji tidak sesuai lagi dengan semangat zaman. Pada 17 September 2014, Fiji menggelar Pemilu pertama sejak negara di Pasifik Selatan itu mengalami kudeta militer tahun 2006.

Pemilu 2014 itu, menurut Chen, untuk mengakhiri "budaya kudeta" di negara itu. Setidaknya, empat pemerintah dari tahun 1987 hingga 2006 berakhir dengan penggulingan. Salah satu pemicunya adalah adanya ketegangan etnis antara pribumi Fiji dan etnis India.

Lebih jauh Chen menjelaskan hasil Pemilu 2014 bahwa Pemimpin Partai FijiFirst Voreqe Bainimarama meraih lebih dari 25 kursi parlemen dari 50 kursi di Pemilihan Umum Fiji.

Sementara itu, mantan Presiden Mongolia Mr. Ochirbat P memberikan perspektif transisi konstitusi dari sudut pandang pengalaman Mongolia. Menurut Ochirbat dalam transisi demokrasi pemilu merupakan instrument yang sangat penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Dalam kata-kata Ochirbat, integritas pemilu dihasilkan dari pilihan, tindakan dan kapasitas para pemimpin nasional, politisi dan warga negaranya. Dukungan untuk pemilu berintegritas dapat berasal dari atas ke bawah, dikendalikan dan diinspirasi oleh para pemimpin yang berusaha menghargai hak asasi manusia, memberdayakan warga negara dan mendirikan lembaga yang transparan, inklusif dan akuntabel. Bagaimanapun, perjuangan berasal dari bawah ke atas, ketika warga negara dan organisasi masyarakat sipil menuntut pemilu berintegritas. Semangat, mobilisasi dan tekanan pada warga negara menghasilkan dorongan politik bagi para pemimpin untuk bertindak secara demokratis. Apapun caranya, integritas pemilu dan legitimasi yang mengalirkan hal-hal tersebut harus dikembangkan sendiri dan dilindungi. Pemilu berintegritas, sebagai perwujudan demokrasi dan penentuan nasib sendiri, harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Ia meyakini bahwa apa yang universal tidak serta merta kompatibel dengan kondisi lokal.

Ochirbat mengatakan bahwa Mongolia selama 70 tahun telah dipimpin oleh partai komunis yang bernama ***Mongolian People's Revolutionary Party*** yang disingkat dengan MPRP. Pada dekade 1990-an, transisi demokrasi menjalar ke seluruh dunia. Terutama di negara-negara komunis, kebangkrutan ideologi komunisme menciptakan

gerakan-gerakan demokratis. Revolusi demokratis di negara Mongolia terinspirasi dari protes yang dilakukan di jalanan ibu kota, Ulaan Bataar. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 1989. Komite pembuat kebijakan pokok dari partai komunis (MPRP) memilih untuk mengundurkan diri secara massal, pada bulan Maret 1990.

Sejak saat itu, Mongolia membuat transisi secara cepat dari satu kekuasaan yang berpusat pada partai komunis menjadi multipartai parlementer. Pada tahun 1992, sebuah konstitusi demokratis lahir sebagai akibat amendemen sejak 1990. Konstitusi Mongolia hasil amendemen menjamin seperangkat hak dan kebebasan, memilih presiden secara langsung, dan menjamin sistem multipartai, pemilu presiden secara langsung, dan pemilu dewan legislatif (*the State Great Hural*). Semenjak itu, negara Mongolia telah mengadakan enam kali pemilihan presiden secara langsung juga melakukan enam kali pemilihan parlemen secara langsung.

Selanjutnya, Mongolia merevisi “Konsep Keamanan Nasional” yang disahkan oleh parlemen Mongolia pada tahun 2010. Revisi tersebut berhubungan dengan penegasan kembali komitmen Mongolia untuk demokrasi. Konsep tersebut menyatakan bahwa pemerintahan parlemen dibangun dengan memberikan penghormatan pada hak asasi dan kebebasan manusia, aturan hukum, serta struktur negara demokratis yang dibangun menurut stabilitas sosial akan memberikan jaminan keunggulan keamanan nasional.

Mengakhiri penjelasannya di atas, Ochirbat menunjukkan perubahan bentuk negara Mongolia dari komunis menjadi demokratis, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ia mengakui dalam merubah bentuk pemerintah dari komunis menjadi demokratis, bukannya tanpa halangan atau tantangan seperti HAM, korupsi, dan keseriusan semua pemangku kepentingan.

Sesi II: Role of Security Sector in Democratic Transitions

Moderator: Prof. Miriam Coronel-Ferrer, mantan ketua panel pemerintah untuk negosiasi the Moro Islamic Liberation Front (MILF)

Panellists:

- 1) Mr. Bhojraj Pokharel, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nepal
- 2) Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, Dewan Penasihat Institut for Peace and Democracy
- 3) Prof. Vijay Naidu, Profesor dan Direktur Studi Pembangunan pada Sekolah Pemerintahan, Pembangunan, dan Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasifik Selatan

Aksi para aktor—baik negara maupun non-negara—sangat penting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan transisi demokrasi. Selain itu, kerja sama di sektor keamanan turut menentukan keberhasilan suatu transisi demokrasi. Demikian pengantar Prof. Miriam Coronel saat memandu sesi kedua.

Sesi ini dilandasi sebuah pemikiran bahwa tantangan utama di banyak kasus transisi adalah membawa tentara dan institusi pertahanan dan keamanan lainnya di bawah kontrol pemerintahan sipil. Di banyak negara Asia, kerap kali terjadi konfrontasi berulang-ulang antara pemerintahan demokratis dan unsur angkatan bersenjata, badan intelijen, dan kepolisian dalam hal pengawasan sipil. Sesi ini melihat pengalaman berharga seputar dukungan sektor keamanan terhadap proses demokratisasi.

Mr. Bhojraj Pokharel, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nepal, memulai sesi dengan konteks situasi negara. Menurutnya, Nepal adalah sebuah negara beraneka ragam (dalam hal demografi, geografi, keanekaragaman hayati, etnis, kasta-budaya-bahasa). Dalam negara plural tersebut terjadi ketidaksetaraan sosial-ekonomi, diskriminasi dan pengucilan penduduk dari pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan serta proses pembangunan bangsa.

Sebagai akibatnya konflik antarpihak meletus. Selama satu dekade (1996-2006) pemberontakan bersenjata Kaum Maois, sekitar 17.000 orang tewas dan ribuan terluka

dan pengungsi besar-besaran, serta rusaknya infrastruktur negara dan hilangnya mata pencaharian penduduk. Intensitas tinggi konflik (pertemuan langsung antara Tentara Kerajaan Nepal serta badan-badan keamanan negara lain—Kepolisian Nasional, Angkatan Bersenjata dan Departemen Intelijen Nasional) dan pemberontak CPN-Maois. Setelah deklarasi konstitusi baru pada 2015, perselisihan mengenai beberapa ketentuan konstitusi sudah mulai dibangun.

Bhojraj pun berbagi pengalaman yang tidak menyenangkan seputar masa lalu Nepal. Ia mengidentifikasi beberapa ketegangan beberapa pemangku kepentingan, di antaranya: (1) Hubungan permusuhan antara monarki dan partai-partai politik; (2) Partai politik besar telah mengangkat senjata melawan rezim di beberapa titik waktu selama perjuangan demokrasi. Tentara dikerahkan setiap saat; (3) Tekanan dari jenderal senior untuk mempertahankan warisan kekuasaan kedaulatan raja dalam konstitusi tahun 1990, yang tidak disetujui oleh partai-partai politik; (4) Hubungan antara pemerintah pasca-1990 dan tentara tidak sehat; (5) Pemerintah lebih fokus pada pemberdayaan polisi yang dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik; (6) Penolakan tentara menegakkan perintah Perdana Menteri untuk mobilisasi melawan pejuang Maois; (7) Tentara dianggap melanjutkan tradisi non-demokratis dan memusuhi pihak Maois bahkan setelah mereka bergabung dengan pemerintah melalui proses perdamaian; (8) Perilaku pribadi dan sikap kepemimpinan kepala staf Angkatan Darat (kepala staf Angkatan Darat pernah berucap bahwa: “saya tidak akan mengizinkan Menteri Pertahanan untuk masuk ke barak saya”); (9) Kegagalan pemerintah Maois untuk mengganti Kepala Staf Angkatan Darat.

Kini Nepal, masih menurut Bhojraj, menunjukkan profil baru yang menunjukkan citra sebagai negara modern. Beberapa indikator Negara demokratis dan modern diutarakan Bhojraj, yaitu: (1) penghapusan monarki yang berusia 238 tahun dan transformasi Nepal menjadi Republik Federal Demokratik abad ke-21 melalui cara-cara damai; (2) raja hidup sebagai warga biasa di dalam negeri, dan pemerintah menawarkan fasilitas keamanan minimum; (3) konflik kekerasan itu berakhir melalui

proses perdamaian tanpa bentuk mediasi atau fasilitasi internasional (diprakarsai dan dipimpin oleh para aktor Nepal); (4) konstitusi demokratis federal yang diumumkan, tetapi perbedaan masih terfokus pada: inklusi, sistem pemilu, kewarganegaraan, dan demarkasi provinsi; (5) sektor keamanan secara hukum di bawah komando sipil, dan konstitusi menguraikan peran dan tanggung jawab sektor keamanan, khususnya militer; (6) pejuang Maois terintegrasi dalam Angkatan Bersenjata Nepal dan tidak ada konfrontasi atas perintah kontrol; (7) komandan tertinggi pemberontak terpilih sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya, dan mantan komandan militer pemberontak juga terpilih sebagai Wakil Presiden.

Bhojraj juga menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi aparat keamanan negara dan non-negara terhadap transisi demokrasi. (1) Pembantaian terhadap keluarga kerajaan. Keluarga Raja Birendra, monarki konstitusional pada tahun 1990 dan menyerahkan kedaulatan kepada rakyat setelah gerakan rakyat pertama menjadi populer dalam waktu singkat. Tentara banyak dikritik pada kegagalan mereka untuk melindungi Panglima Tertinggi mereka dan seluruh anggota keluarganya pada tahun 2001, dan bahkan diduga peran misterius mereka. Kemarahan publik melampaui batasan terhadap raja baru dan tuntutan demokratisasi tentara; (2) aksi tidak populer raja baru. Pangeran Gyanendra, dengan citra publik yang buruk, menjadi raja baru yang tidak disetujui oleh rakyat Nepal. Orang menuduh dia sebagai konspirator utama untuk mengakhiri dinasti saudaranya dan rumor tersebar pada kemungkinan dukungan dari militer untuk konspirasi ini. Keputusan raja menjadi raja sekali lagi mutlak dan akhir demokrasi sangat didukung oleh Tentara Kerajaan pada tahun 2005, yang dipandang sebagai "tentara raja" bukan "tentara negara"; (3) kesepakatan damai. Negosiasi dan finalisasi Perjanjian Damai. Kedua pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian bergabung di Pemerintah dan Interim Parlemen sebagai pemerintahan transisi. Mekanisme politik tingkat tinggi untuk mengembangkan pemahaman politik dan merekomendasikan kabinet tentang penegakan perjanjian damai. Panitia Khusus Integrasi, Rehabilitasi dan Pemantauan pejuang Maois, dan manajemen dari mantan

kombatan melalui integrasi dan pemukiman kembali. Manajemen kedua pasukan dan senjata dipantau oleh UNMIN dan JMCC dan JMT (PBB, Angkatan Darat dan Maois) mekanisme untuk menyelesaikan sengketa atas pengelolaan kedua pihak dan tentara. Mekanisme keadilan transisional diterima, tapi tidak penuh dan tepat waktu ditegakkan sesuai semangat Perjanjian Perdamaian. Prinsip memperkenalkan inklusi dan sekularisme dalam urusan negara, dan proses restrukturisasi negara yang mencakup perekrutan di tentara.

Di akhir paparan, Bhojraj menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran sektor keamanan dalam konsolidasi demokrasi di Nepal sebagai berikut: (1) Tata Kelola pemerintahan (24 pemerintah dalam 26 tahun demokrasi) dan kinerjanya; (2) Menjaga stabilitas politik dan pemahaman dalam kekuatan politik utama; (3) Masa depan reformasi sektor keamanan; (4) Peran Perwalian: tingkat kepercayaan dan keyakinan antara kepemimpinan sipil dan militer; (5) Pelaksanaan konstitusi khususnya restrukturisasi negara dan mengadakan pemilihan lokal, provinsi dan nasional; (6) Masa depan proses perdamaian termasuk fungsi TRC.

Selanjutnya Prof. Vijay Naidu, Profesor dan Direktur Studi Pembangunan pada Sekolah Pemerintahan, Pembangunan, dan Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasifik Selatan, membentangkan presentasinya yang bertajuk **Role of the Security Sector in the Democratic Transition in Fiji**. Ia memulai dengan informasi dasar keadaan Fiji. Ia mengatakan bahwa Fiji adalah negara kepulauan tujuan wisata yang terletak di Pasifik Selatan. Fiji juga dikenal sebagai 'kudeta kudeta tanah'. Populasi multi-etnis diperkirakan berjumlah 900.000, 80% hidup di 'pulau utama' di Viti Levu. Beberapa suku asli yang hidup di Fiji adalah (iTaukei sekitar 58%), Rotumans, Indo-Fiji (34%), selebihnya campuran Eropa, Cina & Kepulauan lain di Pasifik-Melanesians, Polinesia dan Mikronesia. Sebetulnya berdasarkan data di atas, Masyarakat Fiji terdiri dari multi-etnis tetapi sektor keamanan etnis dominan tunggal, terutama militer.

Vijay Naidu melanjutkan paparannya tentang Sektor Keamanan & penggulingan Pemerintah Demokratis. Fiji adalah koloni Inggris pada kurun 1874-1970. Aturan kemerdekaan konstitusi berdasarkan politik komunal, isunya seputar 'demokrasi.' Sektor Keamanan - militer, polisi, penjara. Keterlibatan Militer dalam peran menjaga Perdamaian. Militer dominan & etnis etnis yang mendominasi sektor ini 98% adalah etnis iTaukei. Etnis ini pemegang kekuasaan di pemerintahan negara, di antaranya 3.500 tetap / 1600 cadangan. Pada tahun 1987 terjadi kudeta Mei yang menggulingkan Partai Buruh yang dipimpin pemerintahan koalisi. Kudeta mengakibatkan pemimpin Partai Aliansi berkuasa. Sementara itu, 3 kudeta lagi mengikuti: September 1987; 2000; 2006.

Dalam pada itu, Vijay Naidu menganalisis peran sector kewanman dalam transisi demokrasi. Selama hampir 8 tahun Fiji dicengkeram oleh kediktatoran militer ditandai dengan beberapa hal seperti aturan yang menindas dengan keputusan dan pengingkaran hak asasi manusia seperti Kebebasan Berekspresi & Kebebasan Berserikat. Draft Yash Ghai Konstitusi Rakyat 2012 dibuang dan Konstitusi Republik Fiji 2013 dianulir oleh dekrit Presiden. Aturan dibuat untuk meruntuhkan prose demokratis termasuk melemahkan media, serikat buruh, organisasi masyarakat sipil.

Vijay Naidu mengisahkan beberapa masalah krusial seputar pro dan kontra Konstitusi 2013. Beberapa masalah dalam perdebatan tentang konstitusi 2013 adalah: (1) Identitas Nasional; (2) Daftar Proporsional Sistem Pemilu; (3) sistem Multi-Partai Pemilu 17 September 2014; (4) Hak-hak Ekonomi & Sosial di Bill of Rights; (5) rumusan negara sekuler; (6) Kekebalan terhadap pelaku kudeta militer (Bab 10, 155-58); (7) RFMF untuk memastikan keamanan, pertahanan & kesejahteraan Fiji; (8) Retensi semua keputusan dari Desember 2006 sampai siding pertama parlemen Oktober 2013 (173 (2)).

Vijay Naidu menutup presentasinya dengan situasi terkini Fiji. Menurut Vijay, kekuasaan eksekutif sangat kuat, sementara kekuasaan legislatif & yudikatif lemah. Fiji First Party mendulang sukses dalam Pemilu 2014 dengan meraup 60% dari kesleuruhan

suara serta 32 kursi di parlemen. Sementara itu partai lainnya seperti SODELPA mendudukkan 15 anggota di parlemen. NFP berhasil mendudukkan 3 kadernya di parlemen. Ia juga mengatakan bahwa pendekatan bipartisan hilang serta pemulihan institusi-institusi demokrasi berjalan lambat.

Sementara itu Letnan Jenderal TNI (purn) Agus Widjojo, Dewan Penasihat Institut for Peace and Democracy, mengemukakan pemikirannya seputar peran militer dalam transisi demokrasi di Indonesia. Menurut Agus, reformasi dimulai dari diri TNI mendahului reformasi politik. TNI mengakhiri dwifungsinya dengan meninggalkan peran sosial-politik, dan melikuidasi perwakilannya di parlemen. TNI tidak terlibat dalam transisi demokrasi politik. Menurutnya, kurangnya TNI terlibat dalam transisi demokrasi politik semakin berkontribusi pada transisi demokrasi. Transisi demokrasi yang tersisa dibiarkan untuk dijalankan para politisi sipil. TNI memainkan peran maksimum dapat bermain dalam transisi demokrasi.

Agus menelisik transisi demokrasi 1998. Ia menilai jaminan Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI kala itu memiliki signifikansi dalam mendukung pengalihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden Habibie. Ia tidak menyatakan penolakan apapun sehubungan dengan pengalihan kekuasaan (tidak ada konfrontasi menentang kekuasaan politik pada pengunduran diri Presiden Soeharto). Dia hanya mengingatkan bahwa militer bertanggung jawab dengan keamanan fisik Presiden Soeharto, dan akan menempatkan memperhatikan keselamatan bangsa dengan menempatkan unit militer yang berlaku.

Agus mengatakan bahwa pada saat menit-menit akhir keberadaan terakhir Fraksi Polri dan Militer di DPR RI, perwakilan militer telah mulai berlatih peran non politik. Dalam kasus perdebatan adalah murni isu politik bahkan militer terus keluar dari proses. Militer juga mengeluarkan kebijakan bahwa dalam pemilihan umum keluarga militer bebas untuk memberikan suara pada salah satu partai politik peserta pemilu dan menarik dukungan partisan untuk Golkar, yang pada rezim Orde Baru

merupakan partai pemerintah yang berkuasa. Militer membatasi perannya dalam pemilu untuk peran pasukan keamanan tanpa keterlibatan dalam politik.

Tantangan terbesar transisi demokrasi dalam pandangan tentara, menurut Agus, adalah reformasi militer dan politik berlangsung secara bersamaan, tanpa tersisa lembaga untuk bermain peran mengawasi reformasi. Sebagai spillover pengaturan masa lalu dan budaya politik, ada kecenderungan dari otoritas politik sipil untuk mencari dukungan politik dari militer. Ini menyebabkan reformasi militer tidak dilakukan secara berurutan bertahap. Selain karena waktu yang terbatas, kebijakan, implementasi dan tantangan dari perubahan lingkungan politik menciptakan kebutuhan untuk beberapa tanggapan dan dalam situasi "*learning by doing*."

Agus yang juga merupakan Gubernur Lemhannas memaparkan peran sektor keamanan dalam menopang suksesnya sebuah demokrasi di satu Negara. Beberapa pemikiran Agus dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut: (1) Membuka akses studi banding bagi militer profesional dalam demokrasi yang sudah mapan, dengan memberikan kesempatan militer untuk mengikuti pendidikan militer profesional dan berpartisipasi dalam latihan internasional dan dapat dikombinasikan dengan operasi; (2) Meninjau doktrin dan software lain untuk fokus pada ancaman eksternal bergerak menjauh dari keterlibatan dalam urusan dalam negeri; (3) Meningkatkan profesionalisme dalam militer dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pembangunan postur pertahanan yang diperlukan dan mempertimbangkan kesejahteraan prajuritnya; (4) Membangun kader sipil untuk memiliki pengetahuan dalam urusan pertahanan dan militer, namun mampu bekerja sama dengan militer.

Di akhir paparannya, Agus berkesimpulan bahwa peran Militer Indonesia dalam transisi demokrasi pada dasarnya diwujudkan dalam inisiatif untuk mereformasi diri sebelum transisi politik. Militer didesain untuk ditarik dari peran sosial-politik, karena itu militer kurang melibatkan dirinya dalam transisi demokrasi, semakin berkontribusi pada transisi demokrasi. Menurutnya, keselamatan setiap transisi demokrasi tidak

hanya ditentukan oleh isu militer, tetapi juga efektivitas otoritas politik sipil. Ancaman terhadap transisi demokrasi umumnya akan ditimbulkan oleh limpahan dari warisan bersejarah militer yang masih mempersepsikan diri sebagai penjaga bangsa, sementara politisi sipil masih mencari dukungan politik dari militer.

Sesi III: Role of Leadership and Rise of Social Movement

Moderator: Dr. Edna E.A. Co, Direktur Eksekutif Pusat Studi Integrative dan Pembangunan, University of the Philippines

Panellists:

- 1) Ms. Zolzaya Batkhuyag, Co-Founder dan Direktur Mongolian Women for Change
- 2) Mr. Randolph David, Profesor Emeritus bidang Sosiologi, University of the Philippines
- 3) Dr. Fadli Zon, Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Jakarta, Indonesia

Sesi ketiga yang bertajuk *Role of Leadership and Rise of Social Movements* ini hendak menelaah peran kepemimpinan dan bangkitnya gerakan sosial dalam proses transisi demokrasi di negara-negara Asia. Pemimpin memainkan peran penting dan strategis dalam proses transisi demokrasi, seperti: mobilisasi kebebasan politik, membangun ruang dialog, membangun konsensus dan kesepakatan, membuat prosedur dan aturan main.

Selain kepemimpinan, gerakan sosial dan partisipasi warga adalah hal lain yang secara substantif menjadi kelompok penekan bagi terciptanya transisi demokrasi. Gerakan sosial adalah cermin perubahan dalam struktur warga Negara yang menunjukkan dinamika dalam kehidupan politik di suatu Negara.

Dr. Edna E.A. Co membuka sesi ketiga dengan sebuah pemikiran bahwa gerakan sosial adalah isu sosial-politik global. Artinya, isu ini tidak terjadi dalam skala nasional ataupun regional belaka. Menurutnya, transisi demokrasi selalu melibatkan tiga hal penting yang saling berkelindan: (1) Kepemimpinan (*leadership*); (2) Kewargaan (*citizenship*); (3) gerakan sosial (*social movement*). Ketiganya bahkan membentuk koalisi untuk saling mengisi pascatransisi. Di antara yang paling kelihatan adalah keterlibatan dan sinergi antara NGO dan pemerintah dalam menjalankan program.

Randolf David memulai paparan dengan suatu fenomena bahwa tiga puluh tahun demokrasi di Filipina telah melahirkan begitu banyak gerakan sosial yang berpuncak pada gerakan *people power* di Manila. Seperti diketahui bahwa pada Februari 1986, jutaan warga Filipina tumpah ruah ke jalanan guna mengakhiri kekuasaan Marcos yang berumur dua dekade.

Randolf, yang terlibat dalam gerakan *social people power* Filipina, mengatakan bahwa negara di Asia Tenggara yang sedang berjuang memperkuat demokrasinya itu memberikan sebuah pelajaran yang seharusnya dihindari oleh negara-negara yang sedang dalam masa transisi. Randolf mencatat bahwa Filipina yang berpenduduk 104 juta jiwa itu hingga kini masih saja diselimuti masalah kemiskinan, korupsi dan kejahatan umum lainnya. Namun 30 tahun setelah tumbanganya Marcos, demokrasi Filipina tetaplah sangat lemah. Filipina memiliki semua institusi politik, tetapi semua itu senjang isi dan muatan. Dia melanjutkan bahwa menggulingkan diktator itu lebih mudah ketimbang membangun dan meletakkan kembali proses demokrasi di tempatnya sehingga bisa berjalan dan berlanjut.

Filipina membuktikan bahwa menegakkan tertib politik (*political order*) di sebuah negara tidaklah mudah dikarenakan timbulnya beragam krisis dan tantangan.

Tentang gerakan sosial, Randolf menyebut dua syarat agar gerakan *social* tersebut berhasil, yakni: konsolidasi dan konsistensi. Ia memberikan contoh *people power* tahun 1986 di Filipina sewaktu menggusur Marcos dari tahta. Semua elemen masyarakat sipil bersatu dan konsisten menumbangkan Marcos dengan melupakan semua perbedaan dan sekat-sekat kepentingan.

Mengenai peran kepemimpinan dalam era transisi, Randolf menyebut bahwa pemimpin harus mempunyai kualifikasi legitimasi moral dalam menggerakkan perubahan sosial. Nelson Mandela adalah prototipe pemimpin bermoral yang menggerakkan masyarakat untuk memulai perubahan. Randolf menyebut Nelson berkali-kali ditahan oleh rezim Apartheid, akan tetapi ia berani dan konsisten untuk

terus berjuang merubah keadaan bangsanya. Selain Mandela, Randolph menyebut Aung San Su Kyi sebagai sosok berkelas dalam menggerakkan perubahan di Myanmar. Sebagai konsekuensinya, Aung San Su Kyi harus menghadapi tekanan dari junta militer.

Dari dua contoh pemimpin di atas, Randolph menyimpulkan bahwa meski seorang pemimpin lahir dengan bakat dan modal, ia harus mengkonsolidasikan kepemimpinannya sehingga berdampak nyata bagi suatu perubahan.

Di akhir paparannya, Randolph dengan kecewa menyebut pengalaman demokrasi di Filipina selama 30 tahun adalah ilusi belaka. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita ini demokratis jika kebebasan dan penghormatan terhadap HAM sirna dan tercerabut dari Filipina. Kini pemerintah seenaknya membunuh orang yang disangka sebagai pengedar narkoba tanpa proses peradilan.

Sementara itu Fadli Zon, Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Jakarta, Indonesia yang juga Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam memaparkan sejumlah hal-ihwal kepemimpinan, gerakan sosial, dan transisi demokrasi.

Fadli Zon membuka uraian tentang transisi dalam sejarah Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa transisi 1998 bukanlah transisi pertama dan satu-satunya dalam sejarah Indonesia. Dia menghitung, sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, Indonesia telah bereksperimen dengan pelbagai varian demokrasi. Fase pertama, demokrasi parlementer (1945-1959). Fase kedua adalah demokrasi terpimpin yang digagas Presiden Sukarno, dan ketiga, fase demokrasi Pancasila di bawah Presiden Suharto yang bertahan selama tiga dekade sebelum gerakan reformasi menumbangkan Presiden Suharto.

Mengenai transisi 1998 ia menyebut kejatuhan Presiden Suharto bukan semata-mata karena gerakan sosial, melainkan pertemuan berbagai arus seperti krisis moneter yang menghantam Asia Tenggara, gerakan sosial, dan peran IMF dalam kebijakan ekonominya.

Di depan peserta yang terdiri dari pemerintah, LSM internasional, akademisi serta aktivis, Fadli Zon menggarisbawahi bahwa kepemimpinan yang penuh dengan ide adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam transisi demokrasi. Menurutnya, ide yang

baik jika bertemu dengan momentum maka ia akan melahirkan perubahan sosial-politik yang besar. Ia mencontohkan ketika awal-awal Indonesia memasuki era transisi, ide yang berkembang di tengah masyarakat adalah ide tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gerakan sosial ini makin berkembang dan melahirkan lembaga KPK. Fadli Zon yang mendapatkan gelar doktor sejarah dari UI ini juga menyinggung gerakan sosial yang dipimpin oleh Vaclav Havel yang menggulirkan transisi demokrasi yang damai di Cekoslovakia. Lebih lanjut ia berujar bahwa kepemimpinan penuh ide akan melahirkan perubahan yang damai dan cerdas serta dalam skala besar.

Di forum tahunan tersebut, Fadli juga mengemukakan kritiknya terhadap gerakan sosial. Ia kerap menjumpai sebuah gerakan sosial yang berubah ide dan visinya ketika mencapai kekuasaan politik. Ia memberikan contoh gerakan buruh yang terkonsolidasi bagus ketika menumbangkan rezim Orde Baru, namun justru melemah ketika bertransformasi menjadi gerakan politik. Lebih lanjut katanya gerakan sosial lebih tepat berada dalam gerakan moral ketimbang masuk dalam gerakan politik.

Fadli Zon menilai bahwa dalam perkembangan pasca mundurnya Soeharto Indonesia bertransformasi ke arah demokrasi yang lebih liberal ketimbang Amerika Serikat. Kebebasan seperti kotak Pandora yang menerbangkan euforia ke tengah khalayak: 43 partai politik lahir, konflik komunal di beberapa daerah Indonesia. Kebebasan ini kemudian diikuti dengan pemilihan kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur) langsung oleh rakyat. Demokrasi liberal ini, menurutnya, menjadikan ongkos politik menjadi mahal. Fadli Zon memberikan ilustrasi partai politik dan calon anggota legislatif harus memperebutkan suara 180 juta penduduk yang mempunyai hak pilih dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia. Hal di atas menjadi masalah besar bagi masa depan demokrasi Indonesia. Solusi atas permasalahan mahalngnya ongkos politik, Fadli Zon mengajukan adanya *political finance* yang fair bagi partai politik. Dalam pandangannya, *political finance* ini mendesak untuk dilaksanakan sebab partai politik dilarang mengadakan unit usaha. Selain itu, *political finance* ini bertujuan untuk mencegah korupsi partai politik.

Di akhir paparannya, Fadli Zon mengungkapkan bahwa demokrasi tidak menjamin menghasilkan pemimpin dengan visi dan ide ke depan, akan tetapi di sanalah tantangan kepemimpinan dalam era demokrasi.

Panelis terakhir Ms. Zolzaya Batkhuyag, Co-Founder dan Direktur Mongolian Women for Change membagi pengalamannya seputar transisi demokrasi di Mongolia. Menurutnya, peran pemuda sangat penting dalam gerakan sosial di Mongolia. Gerakan sosial melahirkan banyak *civil society organization* (CSO). Lembaga-lembaga inilah, menurut Zolzaya, yang pada perjalanan selanjutnya memantapkan demokrasi sebagai sistem yang berkelanjutan.

CSO banyak mengeluarkan evaluasi dan indikator untuk mengukur sejauh mana demokrasi berjalan. Melalui ukuran-ukuran dan evaluasi yang dikeluarkan oleh CSO-CSO tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan di Mongolia terbantu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang demokratis. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan CSO di Mongolia yang cukup signifikan mendorong demokratisasi di bidang politik dan pemerintahan hingga Mongolia mampu melewati masa transisi yang damai dan konstitusional.

Menurut Zolzaya, beberapa praktik cerdas yang dihasilkan oleh gerakan sosial Mongolia melalui CSO ini adalah: koalisi besar NGO mengawal pemilihan umum yang demokratis, membantu merumuskan hak-hak kaum LGBT, membantu meningkatkan kesadaran publik akan sexual violence dan sexual harrasment terhadap perempuan, serta mengangkat isu-isu disabilitas ke permukaan sehingga pemerintah melahirkan kebijakan yang responsif terhadap kaum difabel.

Zolzaya menutup sesi dengan memberi catatan bahwa pertumbuhan CSO tidak menjamin terselenggaranya demokrasi di segala lini. Menurutnya, yang diperlukan adalah sinergi dan kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan dalam menjamin demokrasi bekerja di suatu negara. Selain itu, ia memberikan beberapa konsekuensi negatif pertumbuhan CSO, di antaranya banyak CSO yang memosisikan diri sebagai oposan yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah dan parlemen serta banyak CSO yang tidak

turut dalam memajukan demokrasi di negaranya malah sebaliknya justru merusak mekanisme demokrasi yang berjalan sinergis antara pemerintah, partai politik, dan CSO.

Sesi IV: Role of Women in Democratic Transitions

Moderator: Ms. Naranjargal, Presiden Globe International NGO, Mongolia

Panelis:

- 1) Ms. Urantsooj G., Head of Human Development
- 2) Ms. Michelle Reddy, Direktur Program Fiji Women's Rights Movement
- 3) Ms. Sri Danti Anwar, Penasihat senior Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 4) Profesor Miriam Coronel-Ferrer, mantan ketua panel pemerintah Filipina untuk negosiasi the Moro Islamic Liberation Front (MILF), Departemen Ilmu Politik, University of the Philippines

Transisi politik selalu melibatkan peran gender dalam menentukan posisi laki-laki dan perempuan. Penentuan posisi ini berdampak pada peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, peran-peran antara laki-laki dan perempuan terdiskriminasi secara gender.

Melihat hal tersebut moderator Ms. Naranjargal, Presiden Globe International NGO, Mongolia menyebut bahwa perempuan telah memainkan peran yang signifikan dalam transisi politik di negara-negara Asia seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mongolia. Selain itu, hasil-hasil yang dicapai juga berdampak baik bagi perempuan.

Ms. Naranjargal menyebut bahwa isu-isu kunci transisi demokrasi menyangkut beberapa hal: keterlibatan perempuan dalam rembukan soal isi dan hal-ihwal konstitusi baru, keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan, serta reformasi kebijakan gender (kekerasan berbasis gender, hak kepemilikan property, dan hak reproduksi). Sesi ini berbagi pengalaman dan praktik cerdas perempuan yang terlibat dalam penguatan transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokratis dan mendorong kebijakan yang memperkuat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Ms. Naranjargal mengajak semua panelis untuk mendiskusikan strategi untuk memastikan partisipasi aktif dan keterwakilan perempuan dalam periode transisi.

Ms. Urantsooj G., Kepala Human Development Mongolia, mengakui bahwa dalam masyarakat nomaden tradisional seperti Mongolia, perempuan mengalami eksklusi dari sistem politik formal dan lingkup pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan dibatasi dalam rumah tangga. Persepsi kontemporer posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat tradisional Mongolia sangat dipengaruhi oleh narasi populer kehidupan ratu sebagai permaisuri berpengaruh penguasa penting.

Urantsooj melanjutkan paparannya bahwa pada tahun 1924, wanita Mongolia diberi hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Pada tahun 1924, Federasi Perempuan Mongolia didirikan sebagai bagian dari Partai Revolusioner Rakyat Mongolia (*Mongolian People's Revolutionary Party*). Didanai oleh negara, lembaga tersebut memberikan mekanisme untuk partisipasi perempuan dalam sistem politik formal. Karena laki-laki dan perempuan belum dianggap sama di bidang politik sebelum tahun 1921, kebijakan partai adalah bahwa partisipasi perempuan harus didorong secara positif. Sebuah sistem kuota diberlakukan untuk memastikan angka 25 persen representasi perempuan di parlemen. Hasilnya, perempuan terpilih untuk pemerintah daerah (30% pada tahun 1931), dan untuk Baga Khural, badan legislatif tertinggi negara itu pada saat itu.

Lebih jauh menurut Urantsooj, melihat proses pendidikan politik perempuan Mongolia di atas, Mongolia berhasil melakukan perubahan sosial secara nyata. Ketika proses reformasi demokrasi dimulai pada tahun 1990, wanita Mongolia adalah massa yang berpendidikan tinggi, tapi dibebani dengan beban ganda (*burden job*). Proses demokratisasi dan transisi Konstitusi 1992 menegaskan kembali hak-hak yang sama bagi warga negara laki-laki dan perempuan untuk kegiatan sipil dan politik. Proses ini berlangsung dalam konteks keruntuhan ekonomi dan melemahnya hubungan politik dan administrasi dengan Uni Soviet yang dibubarkan. Namun, birokrasi, aturan, mekanisme dan struktur tetap menjadi kekuatan penting sejauh pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang bersangkutan. Mongolia telah mengalami

proses reformasi internal dan lembaga-lembaga negara maupun pihak telah sangat terlibat dalam membentuk transisi. Keterlibatan perempuan dalam partai memperlihatkan kemajuan mengingat adanya pergeseran dari negara satu partai ke demokrasi multipartai.

Pencapaian penting dilakukan oleh Mongolia ketika pada tahun 1996, Dewan Nasional Perempuan didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan *the National Programme for the Advancement of Women* (NPAW). Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Mongolia diangkat sebagai kepala Dewan Nasional Perempuan. Para ahli dari Divisi Pengembangan Manusia dari Kementerian Manajemen dan Perencanaan Strategis yang bertanggung jawab atas urusan perempuan dan ada titik fokus untuk isu-isu perempuan di 21 kabupaten/kota di tingkat lokal. Keberhasilan pelaksanaan Program Nasional, menurut Uraantsooj, membutuhkan komitmen yang kuat dan kemauan politik dari pihak pemerintah, parlemen, dan semua lembaga serta partisipasi aktif dari organisasi berbasis masyarakat, terutama LSM, entitas ekonomi dan individu.

Sebagai penutup ia mengatakan bahwa perempuan telah membuat kemajuan besar dalam membantu kebijakan pemerintah Mongolia untuk mengadopsi NPAW. LSM dan kaukus perempuan telah terlibat secara aktif dalam dua pemilu 1996 dan 2000, memobilisasi pada masalah kuota formal dan pada kebutuhan untuk pilihan yang lebih besar dari kandidat perempuan. Ini adalah bentuk keterlibatan kreatif perempuan akan pemahaman tentang dinamika yang kompleks dan baru dari sistem multipartai dan sistem ekonomi pasar serta dinamika jender yang lebih luas dan terlibat dalam kekuasaan.

Menurut Uraantsooj lebih lanjut, pengalaman dari dua pemilu telah mempertajam fokus strategis pada mesin partai dan pada penargetan pemilihan calon. Ini memberikan titik masuk yang berguna untuk memperbaiki pemahaman tentang dinamika dan hubungan kekuasaan yang terlibat dalam mengubah proses untuk

meningkatkan pemilihan calon perempuan dan mempromosikan pemberdayaan politik perempuan.

Merriam Coronel-Ferrer, mantan ketua panel pemerintah Filipina untuk negosiasi the Moro Islamic Liberation Front (MILF), Departemen Ilmu Politik, University of the Philippines, berbagi pengalaman Filipina terkait gerakan perempuan di ruang public. Ia memulai dengan menyatakan keprihatinannya bahwa gejala seksisme menguasai kantor-kantor pemerintahan.

Ia memberi catatan bahwa setiap pemerintah harus mempunyai rencana aksi nyata yang jelas bagi terbukanya peran perempuan di ruang publik. Rencana aksi nyata tersebut harus ditopang oleh seperangkat aturan perundang-undangan yang konkret.

Merriam Coronel-Ferrer menilai ketika membicarakan peran perempuan harus ada lokalisasi dalam penyelesaian masalah, tidak bisa disamakan antara pemecahan di satu tempat dengan tempat lainnya. Menurut dia, permasalahan perempuan memiliki kompleksitas yang berbeda-beda.

Ia memberikan perspektif peran perempuan dalam penyelesaian konflik. Ini terkait pengalamannya ketika menjadi ketua panel pemerintah Filipina untuk negosiasi the Moro Islamic Liberation Front (MILF), Coronel-Ferrer bermimpi program resolusi konflik membuat wanita secara konsisten terlibat di ranah publik. Dia mengamati bahwa kontribusi perempuan, terutama di pusat-pusat evakuasi, hanya diakui bila ada peperangan. Dia ingin para wanita yang telah terkena dampak konflik memainkan semua peran sosial di ruang publik dalam merespon tuntutan situasi.

Coronel-Ferrer ingin pengakuan wanita yang telah secara terbuka berbagi aspirasi bagi masyarakat dan keluarga. Mengapa perempuan harus aktif dalam perundingan perdamaian? Coronel-Ferrer berujar: perempuan membawa perspektif tersendiri. Peran perempuan ini sangat signifikan dalam penyelesaian konflik. Coronel-Ferrer percaya itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu mendatangkan perspektif perempuan. Keterbukaan ini, untuk Miriam, telah memungkinkan mereka untuk datang dengan perjanjian damai yang komprehensif bahwa mereka berharap

sensitif gender dan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan perempuan yang terlibat dalam penyelesaian konflik.

Sementara itu, Sri Danti Anwar, Penasihat senior Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakui bahwa demokrasi mahal. Perlu perjuangan bagi perempuan untuk duduk dalam jabatan-jabatan publik. Untuk mengatasi keterwakilan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan, Sri Danti mengatakan perlu ditingkatkan lagi. Representasi perempuan di lembaga-lembaga politik perlu peningkatan. Sri Danti menambahkan hal ini juga berlaku bagi persentase perempuan yang menduduki jabatan pengambil keputusan eksekutif. Menurutnya, rendahnya persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan II juga disebabkan kurang tersedianya kandidat perempuan dari tingkatan yang lebih rendah yang bisa dipromosikan untuk menduduki jabatan lebih tinggi. Untuk itu harus ada tindakan afirmatif dengan melibatkan lebih banyak perempuan yang dimulai dari proses rekrutmen sampai pembinaan dan pelatihan.

Sri Danti mengakui belum meratanya pemahaman tentang konsep gender terutama strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.

Sri Danti mengatakan, satu komitmen Indonesia dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender adalah melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang No.7 tahun 1984.

Panelis terakhir Michelle Reddy, Direktur Program Fiji Women's Rights Movement memulai presentasi dengan menyitir data statistik: 31% dari penduduk hidup dalam kemiskinan, yang sebagian besar tinggal di pedesaan Fiji. Situasi lebih buruk, dengan resesi saat ini dan penarikan bantuan penting dari tetangga: Australia dan Selandia Baru. Tidak semua orang memiliki akses ke pendidikan di Fiji. Melihat situasi ini perempuan pedesaan yang paling terkena dampaknya.

Michelle menyatakan harus ada peningkatan kualitas hidup perempuan. Salah satu kualitas tersebut adalah pendidikan bagi perempuan. Perempuan ini tidak terakomodasi dalam ruang publik karena mereka tidak mengenyam pendidikan. Namun mereka bertanggung jawab untuk berhasil mengelola keluarga mereka dan dalam banyak kasus menjadi pencari nafkah. Masalah utama dengan hal ini adalah bahwa tidak ada penghematan pendapatan. Pendapatan sedikit didapatkan oleh wanita tanpa pendidikan dan suami mereka diinvestasikan secara langsung ke dalam makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Ini berarti bahwa jika ada bencana mereka akan sangat terkena dampaknya.

Hal ini cukup mengejutkan karena perempuan adalah bagian penting dari Fiji. Kontribusi mereka terhadap perekonomian sudah cukup besar tapi tidak sepenuhnya diakui oleh negara. Memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan sangat penting untuk negara berkembang untuk tumbuh dengan sukses. Menurut Michelle, perlu ada representasi dari kedua jenis kelamin dalam angkatan kerja formal.

Lebih jauh katanya, Fiji telah berubah banyak sejak tahun 1970 ketika merdeka. Fiji telah melewati empat kudeta di antara banyak perubahan infrastruktur dan kebijakan. Ada semakin banyak perempuan dalam angkatan kerja sekarang tapi kebanyakan di ruang privat. Lebih banyak perempuan mendapatkan pendidikan tinggi dan menjadi pemimpin komunitas mereka. Langkah sudah diambil oleh berbagai pemangku kepentingan untuk membantu agar pendidikan dapat diakses oleh lebih banyak perempuan.

Menurut Michelle jika pendidikan diakses oleh lebih banyak wanita akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk perekonomian. Ia menyerukan bahwa pendidikan harus bisa diakses oleh setiap warga Fiji untuk membangun kelas menengah dan memberdayakan perempuan.

Sesi V: Role of International Community in Transitions

Moderator: Ms. Beate Trankmann, UN Resident Coordinator, UNDP Resident Representative, Mongolia

Panelis:

- 1) Ambassador Sergey Kapinos, Kepala Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Kyrgyztan
- 2) H.E. Nicholas Haysom, Special Representative of the UN Secretary-General for Sudan and South Sudan, United Nations and member, International IDEA Board of Advisers
- 3) Mr. Alexander Shlyk, Acting Head of the OSCE/ ODIHR Election Department.

Ms. Beate Trankmann selaku moderator mengatakan bahwa demokrasi dapat berakar dalam sebuah masyarakat jika semua orang menerimanya sebagai jalan untuk kekuasaan politik. Dalam transisi demokrasi sinergi antara aktor lokal dan aktor internasional melahirkan kekuatan yang padu. Aktor internasional kadang-kadang dapat melakukan upaya-upaya yang mendukung aktor lokal dalam memprioritaskan penguatan gerakan.

Komunitas internasional memainkan peran yang berbeda-beda dalam kasus transisi di Asia: mulai dari keterlibatan sebelum dan sepanjang transisi, membantu penyiapan dan pelaksanaan pemilu pertama di Negara tersebut. Sesi ini hendak melihat potensi dan keterbatasan komunitas internasional dalam transisi serta peran apa saja yang dapat dimainkan komunitas internasional dalam mendukung rezim demokrasi.

Pembicara pertama Sergey Kapinos, Kepala Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Kyrgyztan mengatakan bahwa ada sejumlah prakondisi yang harus dicapai ketika suatu negara menerapkan sistem demokrasi. Prakondisi ini menunjukkan daya saing suatu bangsa dalam menopang proses demokrasi yang berkelanjutan. Ia menyebut prakondisi yang sangat esensial mesti ada adalah struktur

sosial-politik masyarakat yang kuat. ia menggarisbawahi bahwa *capacity-building* tanpa struktur yang kuat akan menjadi tidak efisien dalam proses demokratisasi.

Sergey menyebut proses demokrasi haruslah dilakukan secara sistemik agar dapat menopak demokrasi yang berkelanjutan. Ia meyakini bahwa demokrasi yang berkelanjutan secara sistemik akan membawa legitimasi kepada pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat.

Sergey juga menyebut bahwa gejolak politik (*political upheaval*) di suatu negara harus menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan transparan. Untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan transparan, komunitas internasional harus dilibatkan dalam persiapan, pelaksanaan serta monitoring. Peran-peran komunitas internasional sangat berguna dalam membangun sistem pemilu yang adil dan transparan serta menjamin keberlangsungan sistem demokrasi. Sergey menyebut peran-peran yang dimainkan komunitas internasional berupa: *capacity-building*, pendampingan, pengawasan dan monitoring.

Sergey mengingatkan bahwa demokrasi berkait erat dengan pengalaman yang berbeda-beda dari suatu negara. Kita tidak dapat menyamaratakan pengalaman unik tersebut. Pengalaman negara tersebut juga sangat berkaitan dengan sejarah suatu bangsa. Sejarah tersebut akan mengilhami lahirnya seperangkat nilai yang disepakati oleh masyarakat.

Pengalaman di atas, menurut Sergey dalam penutup presentasinya, akan menciptakan transformasi sosial-politik yang sistemik dan berkelanjutan. Menurut Sergey hal-hal di atas telah dipraktikkan di banyak negara dan menuai keberhasilan.

Sementara itu, Nicholas Haysom, Special Representative of the UN Secretary-General for Sudan and South Sudan, United Nations and member, International IDEA Board of Advisers. Dalam pembukaannya, Haysom mengatakan bahwa ia telah terlibat dalam banyak kasus transisi. Oleh karena itu, ia sangat senang berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam seputar transisi demokrasi.

Haysom memulai dengan paparan bahwa transisi demokrasi adalah pilihan konstitusional setiap bangsa. Jika berbicara konstitusi maka hal itu menyangkut identifikasi diri. paling tidak, menurut pengalamannya, konstitusi dianggap sebagai (1) *common value* atau nilai bersama; (2) *common expression* atau ekspresi bersama; (3) *common-history* atau sejarah yang sama.

Terkait hal di atas, Haysom memberi ingat bahwa transisi demokrasi adalah soal kesepakatan bersama sebagai bangsa. Ia mengajukan kasus demokratisasi Nepal pada dekade 1990-an ketika raja membuka keran demokrasi di Nepal. Ia waktu itu menjadi raja yang populer di seluruh Nepal. Ia memperkenalkan sistem monarki konstitusional sebagai landasan pemerintah. Dalam penyusunan konstitusi baru Nepal melibatkan banyak pihak sehingga dapat bekerja secara komprehensif.

Ia memberi catatan bahwa kasus Nepal adalah sebetulnya kesuksesan komunitas internasional dalam mendukung dan membantu demokratisasi di suatu negara. Haysom menyebut komunitas internasional harus terlibat aktif dalam proses demokratisasi. Menurutnya, bantuan komunitas internasional akan menyiapkan satu generasi yang lebih baik ke depan.

Menurut pengalamannya, segala bentuk partisipasi komunitas internasional berhubungan dengan batas dan teritorial suatu negara yang pada akhirnya bersinggungan dengan kedaulatan, oleh karena itu Haysom menyarankan bantuan komunitas internasional dapat disalurkan bekerja sama dengan PBB. Tujuannya tidak lain agar mudah mencapai sasaran.

Haysom menyinggung bahwa partisipasi komunitas internasional tidak terbatas pada kondisi aman dan damai saja namun juga dalam kondisi perang dan konflik tidak menentu. Oleh karena itu, Haysom mengingatkan pentingnya sektor keamanan dalam transisi demokrasi. Keamanan adalah sektor yang paling menantang dan berbahaya bagi keterlibatan internasional. Ia juga menyarankan *capacity-building* di sektor keamanan dalam kasus transisi demokrasi. ini akan memberikan garansi bagi keberlangsungan demokrasi.

Pembicara terakhir adalah Mr. Alexander Shlyk, Acting Head of the OSCE/ODIHR Election Department. Shlyk mengatakan partisipasi komunitas internasional lebih baik difokuskan pada penyelenggaraan pemilu di negara-negara yang sedang dalam masa transisi demokrasi. Shlyk menyebut pemilu sangat penting dikarenakan pemilu sebagai mekanisme konsolidasi demokrasi dan sarana penyusunan konstitusi baru suatu negara.

Shlyk juga berpendapat bahwa pemilu sebagai fondasi yang fundamental mengingat perannya sebagai sarana kebebasan berekspresi, kebebasan civil society, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul. Oleh karenanya, pemilu harus dijalankan dengan inklusif dan adil.

Dalam melaksanakan pemilu, penting bagi komunitas internasional untuk memastikan terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Dalam lembaga ini akan diatur bagaimana mekanisme beracara menyelesaikan perkara perselisihan hasil suara antarkontestan.

Shlyk juga menyoroti peran pengamat (*observer*) yang dapat dimainkan oleh komunitas internasional. Pengamat pemilu menurutnya harus difokuskan pada isu atau masalah seperti HAM, bantuan teknis, dan substansi pemilu.

**Pertemuan Bilateral Dengan Sekretaris Jenderal International IDEA
(H.E. Yves Leterme)**

Yves Leterme mengungkapkan apresiasi terhadap Fadli Zon atas kehadirannya sebagai salah satu panelis dalam Annual Democracy Forum 2016 di UlaanBaatar. Yves juga memuji perkembangan demokrasi yang semakin maju di Indonesia. Yves menyebut bahwa aktivitas International IDEA adalah riset dan konsultasi terutama di bidang demokrasi dan good governance. Kepada Fadli Zon, Yves mengatakan bahwa International IDEA tengah berfokus pada riset tentang pembiayaan partai politik, an korupsi. Terkait itu, IDEA juga banyak menerbitkan buku-buku tentang pembiayaan politik, korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selama ini, IDEA banyak memberi masukan praktik cerdas kepada negara-negara mitra. IDEA ingin mengembangkan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti GOPAC yang kini dipimpin oleh Fadli Zon. Ia mengajak GOPAC untuk membuat jaringan dengan IDEA dengan duduk bersama untuk mendiskusikan rekomendasi kebijakan serta mendiseminasi hasil-hasil riset yang dilakukan oleh IDEA.

Yves Leterme juga mengatakan IDEA berkomitmen terhadap penguatan kapasitas anggota parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan keuangan. Ia mendukung langkah-langkah yang diterapkan GOPAC untuk memperjuangkan isu-isu antikorupsi.

Merespons Yves, Fadli Zon mengungkapkan apresiasi terhadap IDEA yang telah sukses menyelenggarakan even ini. Ia juga merasa senang dapat berpartisipasi sebagai salah satu panelis di Annual Democracy Forum 2016 ini.

Fadli Zon mengatakan bahwa Indonesia memiliki kehormatan untuk menjadi tuan rumah Konferensi Global GOPAC ke-6 Parlemen di Yogyakarta, yang dihadiri oleh anggota parlemen dari 74 negara di lima benua. Konferensi membahas strategi pemberantasan korupsi. Hal ini didasarkan pada kesadaran kita bahwa pemerintahan yang baik dan transparansi adalah dua prasyarat dasar untuk mencapai yang baru saja

diadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada konferensi itu, Fadli Zon telah dipercayakan oleh sebagai ketua GOPAC.

Fadli Zon berharap dapat memperluas kerjasama GOPAC dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk dengan International IDEA. Fadli Zon menyebut International IDEA dan GOPAC berbagi keprihatinan bersama untuk mempromosikan demokrasi dan akuntabilitas.

Pada kesempatan tersebut Fadli Zon juga menguraikan inisiatif GOPAC. Dalam menciptakan momentum global untuk mendukung perang melawan korupsi, GOPAC berpandangan perlu untuk mendirikan sebuah Protokol Opsional dari UNCAC untuk pengadilan internasional korupsi dan pengangkatan Pelapor Khusus PBB tentang dampak negatif dari korupsi. Selain itu, GOPAC dalam kemitraan dengan Bank Pembangunan dan UNDP Islam kini tengah mengembangkan Handbook bagi Anggota Parlemen tentang pengawasan parlemen terhadap dana pembangunan dan pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Fadli Zon menguraikan untuk memastikan bahwa Handbook memberikan panduan praktis, GOPAC akan melakukan lokakarya tentang Efektifitas Pembangunan untuk Melaksanakan SDGs yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 30-31 Agustus 2016.

Fadli Zon mengatakan bahwa salah satu aktivitas IDEA bertujuan memperdalam demokratisasi. Salah satu kendala yang paling serius yang membatasi potensi demokrasi adalah korupsi. Dalam hal ini, GOPAC dan International IDEA berpotensi bekerja sama untuk mengidentifikasi tantangan di bidang demokratisasi dan good governance yang meliputi: partisipatif, konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan mengikuti aturan hukum. Fadli Zon juga berharap bahwa GOPAC dan IDEA akan mengembangkan lebih lanjut dialog antara kedua belah pihak, kerja sama dan konsultasi mengenai masalah-masalah yang menjadi keprihatinan bersama.

Fadli Zon juga menaruh minat terhadap handbook yang dibuat oleh IDEA tentang *financing politics*. Buku tersebut penting untuk memecahkan masalah-masalah

pembiayaan politik terutama di negara-negara berkembang. Buku ini akan berkontribusi penting terhadap GOPAC mengingat masalah korupsi di anggota parlemen dikarenakan kurangnya pembiayaan politik.

Yves menghaturkan apresiasi terhadap ajakan kerjasama IDEA-GOPAC. Ia menilai IDEA dan GOPAC memiliki *common-ground* yang sama seputar demokrasi. IDEA terus berkomitmen untuk terus melakukan riset, penerbitan, dan pendalaman kajian tentang pemilu, demokrasi, dan good governance. Yves juga mengemukakan kepada Fadli Zon IDEA tengah serius meriset tentang pembiayaan politik terutama terkait penyalahgunaan keuangan seperti korupsi dan pencucian uang.

Kesimpulan

- 1) Dari apa yang dipaparkan para panelis di atas, dapat dikatakan di sini bahwa demokrasi adalah jalan panjang nan terjal yang dihadapi setiap negara. Ia bukanlah proses sekali jadi kemudian mantap dan stabil. Demokrasi adalah ikhtiar tiada henti untuk terus menata sistem yang stabil dan berkelanjutan.
- 2) Dari beberapa perubahan politik yang terjadi di Indonesia, Nepal, Fiji, dan Mongolia, biasanya muncul gerakan sosial (*social movement*) yang memperjuangkan demokrasi bekerja dan berfungsi dengan baik. Meskipun tidak semua gerakan sosial telah berjuang untuk demokrasi, banyak gerakan sosial menjelma menjadi actor penting dalam pengembangan konsepsi dan praktik demokrasi. Selain itu, gerakan sosial adalah upaya oleh orang-orang secara individu dan kolektif untuk membawa perubahan di masyarakat. Sebuah gerakan sosial juga dapat diarahkan untuk menolak perubahan. Sepanjang sejarah, gerakan sosial telah menjadi pokok dalam pematangan negara. Gerakan sosial umumnya mencerminkan serangkaian pertunjukan kontroversial, menampilkan dan kampanye di mana orang biasa dapat berpartisipasi dalam politik publik.
- 3) Dalam pada itu, transisi demokrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat dalam mengarungi perubahan sosial-politik yang cepat. Dari kesimpulan paparan beberapa panelis, demokrasi tidak secara otomatis menyebabkan munculnya kepemimpinan yang berpandangan jauh. Munculnya pemimpin di era transisi menunjukkan kekuatan pendorong yang signifikan dalam perubahan sosial. Para pemimpin di era transisi menghadapi tantangan yang lebih kompleks, stabil, dan tak terduga. Dalam menghadapi era transisi ini, para pemimpin memainkan peran penting dalam memulai dan mengarahkan proses demokratisasi, dengan tindakan mereka menjaga keberlanjutan dalam proses demokratisasi. Reformasi keamanan sangat penting dalam jangka transisi demokrasi. Reformasi sektor keamanan membahas masalah keamanan dan

mencoba untuk memperbaiki situasi melalui reformasi kelembagaan. Keamanan dan perdamaian dipandang sebagai kepentingan publik. Masyarakat secara keseluruhan, serta masing-masing anggota akan mendapat manfaat dari peningkatan keamanan.

- 4) Dalam hal transisi konstitusi, menarik untuk digarisbawahi bahwa transisi konstitusional bukanlah proses yang mudah. Transisi konstitusi harus mempertimbangkan beberapa nilai-nilai mendasar yang harus sangat dipertimbangkan sebagai kendala serta tantangan seperti yang terikat dari orang-orang dengan konstitusi sebelumnya. Selain itu, transisi konstitusi juga membutuhkan proses diseminasi yang mendalam dan meluas dalam masyarakat dan elite politik. Proses diseminasi ini bertujuan untuk mencegah konflik horizontal dan vertikal seperti pergeseran dalam hal arti pada hak-hak sosial, kekuasaan, dan peran pemerintah.
- 5) Dari beberapa kasus transisi konstitusi di Nepal, Bhutan, dan Mongolia terdapat kecenderungan di Negara-negara tersebut bahwa konstitusi mencakup dua perangkat prinsip utama: *Pertama*, konstitusi mewajibkan pemerintah untuk menyediakan standar dasar hidup bagi seluruh rakyat. *Kedua*, konstitusi memasukkan hak-hak universal sebagai hak untuk hidup, untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan, partisipasi politik, kesetaraan di depan hukum dan kebebasan beragama.
- 6) Catatan yang dapat diambil dari sector keamanan dalam transisi adalah sektor keamanan bisa menutupi pertahanan, penegakan hukum, koreksi, dan intelijen serta lembaga yang bertanggung jawab untuk manajemen perbatasan, bea cukai, dan keadaan darurat sipil. Dalam beberapa kasus, sektor peradilan bertanggung jawab atas kasus dugaan tindak pidana dan penyalahgunaan kekuatan disertakan.
- 7) Sektor keamanan juga harus mencakup manajemen dan pengawasan badan. Dalam beberapa kasus, peran mungkin melibatkan penyedia keamanan resmi

atau tradisional. Sektor keamanan juga akan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat sipil untuk secara aktif memantau sektor keamanan dan dikonsultasikan pada kebijakan pertahanan.

- 8) Selain itu, sektor keamanan akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi: partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan mengikuti aturan hukum. Tata kelola yang baik, dalam banyak hal, identik dengan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penciptaan *good governance* dapat dicapai dengan melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam hal ini, parlemen memainkan peran kunci dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dan memastikan akuntabilitas dan transparansi dari semua lembaga negara dan pemerintah.
- 9) Dari hal-ihwal peran perempuan dalam transisi demokrasi dapat dicatat bahwa keterlibatan perempuan berkaitan dengan rembukan soal isi dan hal-ihwal konstitusi baru, keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan, serta reformasi kebijakan gender (kekerasan berbasis gender, hak kepemilikan properti, dan hak reproduksi). Sesi ini berbagi pengalaman dan praktik cerdas perempuan yang terlibat dalam penguatan transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokratis dan mendorong kebijakan yang memperkuat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. *Annual Democracy Forum 2016* ini mendiskusikan strategi untuk memastikan partisipasi aktif dan keterwakilan perempuan dalam periode transisi.
- 10) Dari sesi peran komunitas internasional dalam transisi demokrasi terdapat semacam kesepakatan antarpemilip bahwa gejolak politik (*political upheaval*) di suatu negara harus menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan transparan. Untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan transparan, komunitas internasional harus dilibatkan dalam persiapan, pelaksanaan serta monitoring.

Peran-peran komunitas internasional sangat berguna dalam membangun sistem pemilu yang adil dan transparan serta menjamin keberlangsungan sistem demokrasi. Peran-peran yang dimainkan komunitas internasional dapat berupa: *capacity-building*, pendampingan, pengawasan dan monitoring.

Saran

- 1) Demokrasi, seperti dikatakan di atas, adalah jalan panjang untuk terus memperbaiki sistem agar bekerja baik dan berkesinambungan. Mengingat pembangunan sistem demokrasi membutuhkan kapasitas riset dan pembangunan kelembagaan yang matang, DPR RI perlu membuka ruang peninjauan kerja sama dengan International IDEA.
- 2) DPR RI perlu berpartisipasi aktif—baik sebagai pembicara, panelis, maupun peserta—dalam acara yang dihelat oleh International IDEA.
- 3) DPR RI dalam menjalankan fungsi tradisionalnya—legislasi, pengawasan, dan anggaran—dapat memanfaatkan kajian dan riset yang dihasilkan oleh International IDEA. Terkait hal tersebut, DPR RI dapat melakukan kajian dan riset bersama dengan IDEA.
- 4) Dari hasil pembicaraan bilateral antara Fadli Zon dan Yves Leterme, isu politik yang tengah dihadapi negara-negara, terutama negara berkembang, adalah soal pembiayaan politik yang cenderung mahal. Dari isu pembiayaan politik tersebut, DPR RI-GOPAC-IDEA dapat berkolaborasi dalam riset, workshop, dan diseminasi seputar *financial politics*.
- 5) Pembiayaan politik dapat berujung pada kasus korupsi yang banyak menjerat anggota parlemen. Oleh karena itu, program bersama seputar diseminasi penggalangan antikorupsi potensial dihelat oleh DPR RI-GOPAC-IDEA.

